

**PDRB Kota Jawa Barat periode 2011-2016**

**SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Guruh Sidik Wibowo  
NomorMahasiswa : 14313265  
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
YOGYAKARTA**

**PDRB Kota Jawa Barat periode 2011-2016**

SKRIPSI



Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar  
Sarjana jenjang strata I  
Jurusan Ilmu Ekonomi,  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Guruh Sidik Wibowo  
Nomor Mahasiswa : 14313265  
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**  
**2019**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta.....

Penulis,

*Guruh*



Guruh Sidik Wibowo

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **PDRB Kota Jawa Barat periode 2011-2016**

Nama : Guruh Sidik Wibowo  
Nomor Mahasiswa : 14313265  
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta,.....

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Suharto, S.E., M.Si.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA JAWA BARAT PERIODE 2011-  
2016**

Disusun Oleh : **GURUH SIDIK WIBOWO**

Nomor Mahasiswa : **14313265**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 18 Juni 2020

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Suharto, SE., M.Si.

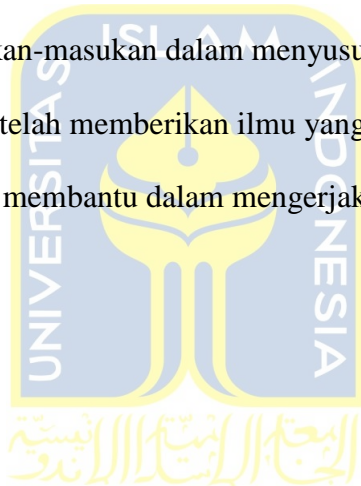
Penguji : Unggul Priyadi Dr.,M.Si.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan  
Ekonomika Universitas Islam  
Indonesia  
  
Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Saya ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan oleh penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Orang tua tercinta Bapak Purwanto,S.E dan Ibu Erna Ciptaningrum atas jerih payah, Do'a dan semangat yang telah diberikan.
2. Suharto,S.E.,M.Si. pembimbing yang telah sabar dalam mengarahkan dan memberikan masukan-masukan dalam menyusun skripsi
3. Semua dosen yang telah memberikan ilmu yang berharga
4. Semua teman yang membantu dalam mengerjakan skripsi



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur atas rahmat dan karunia yang diberikan Allah hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul . **PDRB Kota Jawa Barat periode 2011-2016**. Skripsi ini tersusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Setrata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang penulis miliki, karenanya penulis mengucapkan terima kasih untuk kritik dan saran yang telah diterima maupun yang akan diterima. Penyusun skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Jaka Sriana Drs.,M.Si.,Ph.D.. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Yth. Bapak Akhsyim Affandi, M.A selaku Ka-Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Yth. Bapak Suharto,,S.E.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang ditengah kesibukannya dengan sabar dan penuh perhatian membimbing serta memberikan dukungan moril hingga skripsi ini selesai.
4. Yth. Bapak Anjar sang juru kunci jurusan IE yang banyak membantu dalam hal akademik.
5. Orang tua tercinta Bapak Purwanto dan Ibu Erna Ciptaningrum. atas jerih payah, Do'a dan dukungan yang telah diberikan yang tak mungkin terbalaskan, terima kasih Bapak dan Ibu.

Yogyakarta,.....

Penulis

Guruh Sidik Wibowo

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN UJIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Kajina Teoretis .....	9
1. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi .....	9
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi .....	18
3. Pengeluaran Pemerintah.....	32
C. Kerangka Pemikiran.....	36
D. Hipotesis Penelitian.....	36



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis dan Cara Pengumpulan .....	38
B. Definisi Operasional Variabel.....	39
1. Variabel Dependen (Y) .....	39
2. Variabel Dependen (X) .....	39
C. Metode Analisis .....	40
D. Estimasi Model Regresi Data Panel.....	41
1. Metode Estimasi Data Panel .....	42
2. Uji Hausman .....	44
3. Pengujian Hipotesis.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Hasil Penelitian .....	47
1. Deskripsi Data.....	47
2. Hasil Pengujian.....	52
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Indeks Pembangunan Manusia.....	57
B. Jumlah Penduduk Miskin.....	58
C. Pengeluaran Pemerintah.....	58
<b>BAB VI SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
A. SIMPULAN .....	60
B. SARAN.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Tabel 1.1 PDRB Kota Jawa Barat periode 2011-2016 Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 .....	3
Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu .....	7
Tabel 4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat 2011-2016 ...	48
Tabel 4.2: Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat, 2011–2016 .....	50
Tabel 4.3: Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Barat, 2011–2016 .....	51



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Diagram Pertumbuhan Solow.....	31
Gambar 2.2 Model Diagram Pertumbuhan Solow.....	33
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4.3 Grafik hasil jumlah nilai tes siklus I.....	53



## **ABSTRAK**

### **PDRB Kota Jawa Barat periode 2011-2016**

**Guruh Sidik Wibowo**

**Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, UII**

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat PDRB di Jawa Barat dengan variabel bebas indeks pembangunan manusia, jumlah kemiskinan dan pengeluaran pemerintah. Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 2011 - 2016 dan cross section 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari BPS. Penelitian ini menggunakan model Fixed Effect bahwa variabel indeks pembangunan manusia dengan nilai koefisien 4467,7 dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dengan nilai koefisien 8,26 terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat sedangkan variabel jumlah kemiskinan dan belanja pemerintah berpengaruh negatif terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat dengan nilai koefisien -115,1. Berdasarkan penelitian, nilai R-Square sebesar 0.981747, yang berarti perubahan kemiskinan di Jawa Barat sebesar 98,17% yang dipengaruhi indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan dan pengeluaran pemerintah.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Laju Pertumbuhan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Kegiatan perekonomian tercermin dari hasil pembangunan, dimana pembangunan dilakukan bertujuan untuk mengentaskan pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan dengan salah satu jalannya adalah perbaikan pendapatan per kapita masyarakat dan perbaikan di berbagai sektor bidang usaha. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di wilayah tersebut. (bulunegkab.go.id diakses tanggal 18 Maret 2020)

Pertumbuhan ekonomi secara umum biasanya diukur dari peningkatan PDRB dari suatu daerah atau negara yang menjadi objek penelitian. Cara lain adalah dengan melihat perbaikan pendapatan per kapita, dimana yang dilakukan secara makro adalah dengan cara mengusahakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat. Dari hasil produksi domestik regional bruto (PDRB) di berbagai sektor lapangan usaha, baik sektor basis atau unggulan maupun sector non basis ataupun atas sektor konsumsi, investasi,

net perdagangan internasional dan pemerintah dengan memicu peningkatan output usaha namun juga sebaiknya disertai dengan penurunan tingkat pengangguran juga dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yg sedang terjadi. Pertumbuhan ekonomi merupakan factor penting yang harus ada di dalam pembangunan ekonomi, dimana PDRB diharapkan harus lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk, dengan demikian peningkatan pendapatan perkapita dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dengan sendirinya ataupun dengan campur tangan pemerintah harus dapat dinikmati masyarakat. (Sumarni, 2013)

Pertumbuhan ekonomi ini sangat menyangkut seluruh aspek yang ada di suatu daerah, khususnya tipikal sector-sektor lapangan usaha sebagai sumber output dan pendapatan/income masyarakatnya. Aspek ekonomi yang menyangkut masalah pertumbuhan ekonomi menurut penulis secara umum adalah tingkat produksi domestik regional bruto, inflasi yang terjadi, realisasi modal yang terjadi yang memungkinkan pertumbuhan sektor ekonomi bertumbuh dan tingkat angkatan kerja. Jawa Barat, merupakan propinsi pusat pertumbuhan ekonomi yang cukup diperhitungkan di Indonesia. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi di propinsi Jawa Barat reaktif tinggi. Tabel pada halaman berikut ini adalah paparan atas ekonomi di Jawa Barat, periode 2011-2016. (bappedajabarprov.go.id diakses tanggal 20 Maret 2020)

**Tabel 1.1 PDRB Kota Jawa Barat periode 2011-2016 Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010**

PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	(Seri 2010) Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,48	4,62	4,37	3,95	5,07	5,60
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,59	4,27	14,34	3,49	-8,13	5,48
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,05	6,18	0,89	3,64	7,57	3,76
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	10,74	10,50	-1,02	7,11	1,27	4,59
5. Perubahan Inventori *)	-8,96	67,84	-22,46	-2,15	-30,41	3,99
6. Ekspor Barang dan Jasa	17,11	9,23	-6,29	5,64	3,48	2,93
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	12,31	14,82	-17,47	3,68	-4,43	1,26
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,50	6,50	6,33	5,09	5,05	5,66

Terlihat dari tabel di atas, PDRB tertinggi adalah pada tahun 2011 dan 2012 sebesar 6,50%. Dari data diatas terlihat bahwa terjadi trend penurunan PDRB dari tahun 2012 sampai tahun 2014 lalu kenaikan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015, sampai tahun 2016.

Dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi tidak lepas akan kebutuhan penanaman modal atau investasi, karena investasi adalah kebutuhan utama dalam pembangunan yang menghendaki adanya tingkat pertumbuhan. Menyadari pentingnya investasi dalam pembangunan ekonomi maka pemerintah berusaha meningkatkan pengeluaran serta kebijaksanaan guna mendorong sektor-sektor untuk ikut dalam memperkuat tumbuhnya perekonomian (Kurniawan,2009).

Investasi di Jawa Barat terdiri dari dua jenis investasi yaitu, investasi yang dilakukan oleh swasta atau pemerintah dan investasi oleh pihak luar negeri. Terdapat dua jenis investasi sebagai sumber pembiayaan yaitu PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing).

Indikator penting lainnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini akan bertambah apabila suatu daerah mempunyai jumlah penduduk yang bertambah pula, penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Namun di sisi lain, dari penambahan penduduk yang tidak diimbangi oleh kesempatan kerja akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan kemakmuran penduduk, serta akan menimbulkan semakin banyaknya pengangguran.

Sumber daya manusia merupakan salah satu pemicu untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang nantinya diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik. Investasi sumber daya manusia ini sangat penting khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup rendah dibanding negara-negara lain.

Salah satu faktor utama yang menentukan PDRB adalah tingkat pelatihan faktor input tenaga kerja (human capital) (Gherghina,2013). Maka dari itu apabila sumber daya manusia dikelola dengan baik yaitu melalui pendidikan yang tinggi maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas tinggi pula, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi.



Berdasarkan uraian di atas maka penulis berusaha untuk mengetahui lebih jauh mengenai faktor apa saja yang yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Oleh karena itu di ambil judul skripsi “PDRB KOTA JAWA BARAT 2011-2016”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan tersebut, dapat ditentukan rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap PDRB di Jawa Barat tahun 2011-2016.
2. Bagaimana pengaruh jumlah tingkat kemiskinan terhadap PDRB di Jawa Barat 2011-2016.
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB di Jawa Barat 2011-2016.

## **C. Tujuan Penelitian**

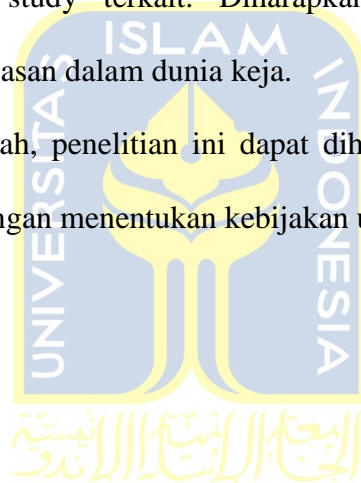
Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis besarnya pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap PDRB di Jawa Barat tahun 2011-2016.
2. Menganalisis besarnya pengaruh jumlah tingkat kemiskinan terhadap PDRB di Jawa Barat 2011-2016.
3. Menganalisis besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB di Jawa Barat 2011-2016.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini :

1. Bagi penulis, penelitian ini adalah syarat dalam meraih gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, penulis diharapkan dapat memahami faktor apa yang mempengaruhi PDRB di provinsi Jawa Barat.
2. Untuk pengetahuan, diharapkan penelitian ini menambah pemikiran atau refensi dalam study terkait. Diharapkan juga penelitian ini dapat menambah wawasan dalam dunia kerja.
3. Untuk pemerintah, penelitian ini dapat diharapkan menjadi saran dalam bahan pertimbangan menentukan kebijakan untuk pendapatan daerah.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Keterangan	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Yuliarmi (2008) ”Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Propinsi Bali”	OLS	Variabel yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi konsumsi RT, investasi dan pengeluaran pemerintah
2	Deddy Rustiono (2008) Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah	OLS	PMA, PMDN, Angkatan Kerja, & Pengeluaran Pemda berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penambahan dummy variable (krisis 1997) menjadi berpengaruh negative. Adanya krisis 1997, membuat perbedaan yang nyata antara sebelum dan sesudah krisis terhadap kapasitas output (pertumbuhan ekonomi)

3.	<p>Wahyudin (2013)</p> <p>Determinan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia</p>	OLS	<p>Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan. peningkatan PMDN sebesar satu persen maka pertumbuhan ekonomi disetiap kabupaten/kota di DIY mengalami kenaikan sebesar 0,10, Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa. Yogyakarta</p>
4.	<p>Yuni Elvina Hasibuan (2011)</p> <p>Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi Kota medan</p>	OLS	<p>Belanja pembangunan daerah, pendapatan asli daerah, investasi dan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap ekonomi kota medan</p>

5.	Wardihan dkk (2013) Determinan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang	OLS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan, kesempatan kerja, belanja modal dan Investasi Swasta memiliki hubungan yang sangat kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten Enrekang
----	--	-----	--

Berdasarkan kajian pustaka di atas maka peneliti mengacu kepada Yuni Elvina Hasibuan dikarenakan variabel yang digunakan dan alat analisis yang digunakan hampir sama

## B. Kajian Teoretis

### 1. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Dalam rangka pembangunan nasional, tujuan pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pertanian. Tulang punggung pembangunan bertumpu pada sektor pertanian, hal ini disebabkan sebagian masyarakat Indonesia terlibat dalam kegiatan pertanian. Hal ini dapat juga dijumpai di kebanyakan negara sedang berkembang dimana lebih dari setengah penduduknya berada pada sektor pertanian.

Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu daerah ataupun wilayah tertentu baik yang dihasilkan oleh perusahaan dalam negeri maupun yang dihasilkan oleh perusahaan luar negeri yang berada didalam negeri.

Herlambang berpendapat, dari berbagai variabel ekonomi makro, GDP ataupun PDB maupun PDRB merupakan variabel ekonomi yang menempati posisi terpenting. Sebagaimana diketahui GDP maupun PDRB mengukur output barang dan jasa dari suatu negara dan pendekatan perhitungan pendapatan dari negara tersebut. Perhitungan pendapatan nasional ini merupakan salah ukuran makro yang utama tentang kondisi suatu negara (Herlambang, 2002; 15).

Menurut BPS (2002; 4), dalam proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu output total dan jumlah penduduk. Output perkapita merupakan output total dibagi dengan jumlah penduduk. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai-nilai barang-barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Definisi dari Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode tertentu atau kurun waktu tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut (Rahardja dan Manurung, 2002: 204).

Produk Domestik Regional Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, ataupun merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar perhitungannya (Sukirno, 2001:38).

Produk Domestik Regional Bruto adalah merupakan penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.

- a. Output adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Nilai output diperoleh dari perkalian antara produksi dan harga.
- b. Biaya antara merupakan biaya-biaya dari barang dan jasa yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu output oleh unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan periode tertentu.
- c. Nilai tambah bruto merupakan selisih antara nilai output dengan biaya antara.

Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu dalam tahun tertentu

baik yang dihasilkan oleh perusahaan dalam negeri maupun yang dihasilkan oleh perusahaan luar negeri yang ada di dalam negeri. Dimana, produk domestic regional bruto ini dapat dihitung melalui 3 cara yaitu:

- a. Pendekatan Hasil Produksi (*Product Approach*), metode ini menghitung PDRB yaitu dengan cara menghitung besarnya total output ataupun produk oleh suatu perekonomian. Cara perhitungan dalam praktik dalam pengerjaannya adalah dengan membagi- bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi. Jumlah output masing-masing sector merupakan jumlah seluruh output perekonomian, hanya saja ada kemungkinan bahwa output yang dihasilkan suatu sektor berasal dari output sektor lain atau juga dapat saja merupakan input bagi sektor lain. Sehingga untuk menghindari perhitungan ganda atau multiple counting, maka yang dipergunakan adalah metode produksi dengan menghitung nilai tambah (value added) masing – masing sektor ataupun selisih nilai output dengan nilai input antara (Rahardja dan Manurung, 2002: 208-210) Dimana sektor – sektor perekonomian tersebut di Indonesia dibagi dalam 9 kelompok, yakni sektor:

- 1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan.
- 2) Pertambangan dan Penggalian.
- 3) Industri Pengolahan.
- 4) Listrik, Gas dan Air Bersih.
- 5) Bangunan



- 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran.
  - 7) Pengangkutan dan Komunikasi.
  - 8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.
  - 9) Jasa-jasa dan lainnya.
- b. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*), yaitu model yang memandang pendapatan nilai out – put sebagai nilai total balas jasa atas faktor-faktor produksi yang dipergunakan pada proses produksi. Adapun faktor-faktor produksi (Q) terdiri dari : tenaga kerja (L), kapital atau modal (M), uang (U) dan kemampuan entrepreneurship (E). Dapat digambarkan persamaan fungsi produksinya sebagai berikut:

$$Q = f(L, K, U, E)$$

Dan nilai balas jasanya dalam skala makro adalah Pendapatan Nasionalnya (PN) terdiri dari : upah atau gaji (w), pendapatan bunga (i), pendapatan sewa (r) dan tingkat keuntungan ( $\pi$ ). Persamaan fungsi balas jasa dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$PN = w + i + r + \pi$$

Namun, di Indonesia metode ini jarang bahkan tidak dipergunakan ataupun dipublikasikan (Rahardja dan Manurung, 2002: 211-217).

- c. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*), pada metode perhitungan Produk Domestik Regional Bruto dengan pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir atas barang – barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu kawasan daerah

administratif maupun negara. Hal ini diperhatikan segi atas penggunaannya, dimana ada dikelompokkan atas 6 alokasi penggunaan, yaitu (Robinson Tarigan, 2005:24 – 25) :

- 1) Konsumsi Rumah Tangga
- 2) Konsumsi Lembaga Swasta nirlaba
- 3) Konsumsi Pemerintah
- 4) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB Investasi)
- 5) Perubahan Stok, dan
- 6) Ekspor Netto.

Namun dengan catatan, bahwa konsumsi lembaga yang mencari untung tidak dimasukkan dengan alasan bahwa konsumsi mereka bukan merupakan konsumsi akhir produksi sehingga dapat menghindari perhitungan ganda atau multiple counting.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa PDRB maupun PDB dapat ditunjukkan baik dalam bentuk harga berlaku maupun didasarkan atas harga konstan pada suatu tahun yang dianggap perekonomiannya cenderung stabil dalam satu periode tersebut.

Namun, dalam perhitungan lanjut, PDRB ataupun PDB dalam bentuk harga berlaku dapat memberikan hasil yang menyesatkan. Hal ini dikarenakan masih terkandung didalamnya faktor inflasi sehingga harus didasarkan pada tahun dasar tertentu yang kemudian dikenal atas dasar harga konstan. Yang dimaksud dengan harga konstan adalah harga yang dianggap tidak berubah dan diperlihatkan pada tahun dasar tersebut

dimana perekonomian berada dalam kondisi baik atau stabil dapat dilihat dalam persamaan sebagai berikut (Rahardja dan Manurung, 2002: 219) :

$$\text{dimana, } PDRB_{\text{Riil}} = \frac{PDRB_{\text{Nominal}}}{\text{Deflator}}$$

dan dapat dihitung juga inflasi yang menyertainya dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{Deflator}_t - \text{Deflator}_{t-1}}{\text{Deflator}_{t-1}} \times 100\%$$

Sehingga, dengan melihat nilai PDRB maupun PDB dalam bentuk harga konstan tahun tertentu dapat memberikan manfaat. Adapun manfaatnya seperti analisis kemakmuran suatu daerah ataupun suatu negara, masalah-masalah sosial yang terjadi, masalah-masalah produktifitas dan banyak hal lainnya (Rahardja dan Manurung, 2002: 219).

Nilai pendapatan baik regional maupun nasional dalam beberapa tahun menggambarkan kenaikan ataupun penurunan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut, namun kenaikan atau penurunan yang terjadi dibedakan dalam dua faktor yaitu (Tarigan, 2005: 20-21):

- a. Kenaikan/penurunan riil, yaitu kenaikan/penurunan tingkat pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan riil pendapatan penduduk, berarti daya beli

penduduk di daerah tersebut meningkat misalnya mampu membeli barang yang sama kualitasnya dalam jumlah yang lebih banyak.

- b. Kenaikan/penurunan pendapatan yang disebabkan adanya faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan pendapatan yang hanya disebabkan inflasi (menurunnya nilai beli uang) maka walaupun pendapatan meningkat tetapi jumlah barang yang mampu dibeli belum tentu meningkat. Perlu dilihat mana yang meningkat lebih tajam, tingkat pendapatan atau tingkat harga.

Sehingga menurut Robinson Tarigan, agar dapat mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (riil) maka faktor inflasi yang menyertainya harus dikeluarkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, pendapatan riil yang tidak terikat didalamnya inflasi merupakan pendapatan atas dasar harga konstan. Dan PDRB umumnya diukur dari perubahan yang ditampilkan pada pendapatan atas dasar harga konstan.

Salah satu indikator telah terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional yang dihasilkan oleh sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu. Sebab besarnya output nasional dapat menunjukkan beberapa hal penting dalam sebuah perekonomian, seperti (Rahardja dan Manurung, 2002:203):

- a. Merupakan gambaran awal tentang efisiensi sumber daya yang ada dalam perekonomian.
- b. Merupakan gambaran awal tentang produktifitas dan tingkat kemakmuran suatu negara

- c. Gambaran awal tentang masalah – masalah struktur yang dihadapi sebuah perekonomian.

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar menghasilkan keterkaitan dan saling mempengaruhi antar faktor-faktor yang mendukung pembangunan ekonomi itu sendiri dan dapat dicermati serta dianalisis dengan baik. Sehingga dapat diketahui deretan peristiwa yang timbul dan akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi serta taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya. Yang selanjutnya, pembangunan ekonomi itu perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi pada suatu daerah maupun negara, ditunjukkan dengan tingkat pertambahan GDP atau GNP.

Pertumbuhan ekonomi menurut W. W. Rostow dalam bukunya yang berjudul “The Stages of Economics Growth” menyatakan bahwa perubahan dari keterbelakangan kepada kemajuan dijelaskan dalam suatu seri tahapan yang harus dilalui oleh setiap negara bahkan daerah regional. Dimana mengenal masyarakat dalam dimensi ekonomi yang terletak dalam salah satu dari beberapa tahapan kategori yaitu: masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas kearah pertumbuhan yang berkesinambungan, kematangan dan zaman konsumsi massa yang tinggi. Tahapan tersebut juga pada akhirnya merupakan suatu teori pertumbuhan ekonomi dan lebih umum lagi bahkan lebih bersifat parsial. Salah satu

pikiran utama mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah bahwa setiap upayanya harus ada mobilisasi yang cukup kuat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi tersebut (Sanusi, 2002: 26)

Menurut Todaro, ada tiga (3) faktor yang mempengaruhi dalam proses pertumbuhan ekonomi dari setiap daerah regional maupun nasional, yakni (Todaro, 2000: 137) :

- a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk ataupun jenis dari investasi baru yang ditanamkan pada aset berupa tanah, peralatan fisik, sumber daya manusia, dan sebagainya.
- b. Pertumbuhan penduduk yang berimplikasi pada jumlah angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
- c. Kemajuan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk terus bertambah dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah terus, maka diperlukan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini bisa didapat melalui peningkatan output agregat (peningkatan produksi barang – barang dan jasa) setiap tahunnya (Tambunan, 2001:2).

## 2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa teori yang mencoba menerangkan tentang pertumbuhan ekonomi, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Teori Pertumbuhan Harrod – Domar

Teori ini dibentuk oleh ahli ekonomi Roy Harrod dan Evsey D. Domar dimana berusaha menunjukkan syarat-syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap dalam jangka panjang adalah melalui peran investasi. Adapun untuk memenuhi keperluan investasi ini, maka dalam suatu perekonomian daerah maupun negara harus menyisihkan suatu bahagian dari pendapatannya untuk ditabung. Sebab tabungan ini akan membentuk investasi baru melalui penambahan stok netto kapital yang baru (Sanusi, 2002: 27).

Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa:

- 1) Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh.
- 2) Dalam perekonomian dua sektor (Rumah Tangga dan Perusahaan) berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada.
- 3) Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol)
- 4) Kecenderungan untuk menabung (Marginal Propensity to Save =MPS) besarnya tetap, demikian juga ratio antar modal dan output (Capital OutputRatio= COR) dan rasio penambahan modal-output (Incremental Capital Output Ratio)

Dalam teori ini memiliki kelemahan yang sangat terasa pada suatu daerah regional maupun negara sedang berkembang. Kelemahan itu dikenal dengan istilah Saving Gap atau kesenjangan tabungan dimana tabungan yang dilakukan masih kurang untuk menutupi keperluan penambahan stok kapital netto bagi pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Untuk itu, agar kesenjangan tabungan dapat ditutupi maka dilakukan pinjaman luar negeri atau mengundang investasi asing memasuki suatu perekonomian (Mankiw, 2000: 659).

b. Teori Perubahan Struktur

Teori pertumbuhan ekonomi ini dikembangkan oleh para neoklasik, salah satu yang terkenal adalah W. Arthur Lewis. Teori ini menjelaskan tentang mekanisme yang memungkinkan perekonomian suatu daerah atau negara dapat mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri mereka dari suatu sector terhadap sector lain yang lebih modern (Sanusi, 2002:31).

Pada model ini menggunakan piranti yang berkaitan dengan masalah harga dan alokasi sumber daya alam serta ekonometrik untuk menjelaskan terjadinya proses transformasi. Yang mana dilihat dari dua faktor utama yaitu faktor surplus tenaga kerja dan surplus kapital.

Adapun asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengalihan tenaga kerja dan penciptaan tenaga kerja adalah sebanding dengan akumulasi kapital.
- 2) Pasar tenaga kerja yang kompetitif akan menjamin upah riil.



3) Jumlah tenaga kerja di desa naik dan dikota menurun (kapital lebih besar).

Perlu diperhatikan, bahwa penurunan peran output pertanian tidak berarti produk sektor pertanian secara absolut adalah turun. Tetapi, justru yang seringkali terjadi adalah hanya penurunan produksi secara relatif. Hal ini ditemukan oleh Chennery dalam studi penelitian empiris (Sanusi, 2002: 36) Pembangunan ekonomi, oleh sebagian ahli ekonomi diartikan berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah Economic Development is Growth plus Change, yaitu pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan – perubahan dalam struktur serta arah kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, dalam pembangunan ekonomi diartikan bukan hanya pada masalah perkembangan pendapatan regional maupun nasional tetapi juga melihat kepada modernisasinya kegiatan ekonomi (Sukirno, 2005: 415).

Dalam pembangunan ekonomi terkandung pengertian implisit adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat baik GDP maupun PDRB dimana kenaikannya dibarengi dengan perubahan-perubahan dan modernisasi serta memperhatikan aspek-aspek pemerataan pendapatan (income equity). Sehingga pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi tetapi, pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi bukan hanya pertambahan hasil produksi ataupun kenaikan pendapatan perkapita, tetapi juga terdapat perubahan – perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti lembaga-lembaga, pengetahuan dan pendidikan, teknik serta juga bersifat kualitatif.

Pada akhir dasawarsa 1960-an, para ekonom menyadari bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan pembangunan. Maka mulailah dilakukan pengkajian ulang tentang definisi pembangunan ekonomi itu sendiri. Myrdal dalam Kuncoro (2006) menyebutkan bahwa pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Adapula yang menekankan pentingnya perubahan pertumbuhan dengan perubahan (growth with change). Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembangunan tidak hanya mencapai peningkatan Produksi (PDRB/PDB) saja tetapi lebih dari itu yaitu memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan lebih diartikan sebagai bagaimana mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

c. Model Pertumbuhan Ekonomi Solow – Swan (Neo – Klasik)

Robert Solow dari Massachusetts Institute Technology (MIT) dan Trevor Swan dari Australian National University secara sendiri-sendiri mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang sekarang sering disebut dengan nama model pertumbuhan Neo-Klasik. Seperti halnya dengan model Harrod-Domar, model Solow-Swan

memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi.

Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini tetap juga mendasarkan pada analisis klasik yaitu bahwa perekonomian tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya dipergunakan sepanjang waktu. Adapun rasio atas modal terhadap output dapat berubah dan bersifat dinamis. Untuk menciptakan sejumlah output tertentu, maka diperlukan jumlah modal yang berbeda beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda beda sesuai yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang dipergunakan maka tenaga kerja yang diperlukan lebih sedikit, sebaliknya jika modal yang dipergunakan lebih sedikit maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Dengan adanya flektibilitas ini, suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tidak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu (Wijono, 2006) Walaupun dalam kerangka umum dari model Solow-Swan mirip dengan model model Harrod-Domar, tetapi model Solow-Swan lebih “luwes” karena :

- 1) Menghindari masalah “ketidakstabilan” yang merupakan ciri warranted rate of growth dalam model Harrod-Domar.
- 2) Bisa lebih luwes digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah distribusi pendapatan.

Keluwesan ini terutama disebabkan oleh karena Solow dan Swan menggunakan bentuk fungsi produksi yang lebih mudah dimanipulasikan secara aljabar. Dalam model Harrod-Domar, output dan capital dan output dan tenaga kerja masing-masing dihubungkan oleh satu “fungsi produksi” dengan koefisien yang tidak bisa berubah, yaitu  $Q_p = hK$  dan  $Q_n = nN$ . Dalam model Neo-Klasik dari Solow dan Swan dipergunakan suatu fungsi produksi yang lebih umum, yang bias menampung berbagai kemungkinan substitusi antara capital (K) dan tenaga kerja (L). Bentuk fungsi produksi adalah:

$$Q = F ( K, L )$$

Yang memungkinkan berbagai kombinasi penggunaan K dan L untuk mendapatkan suatu tingkat output. Fungsi produksi semacam ini (yang sering dijumpai dalam teori ekonomi mikro) disebut fungsi produksi Neo-Klasik. Dalam menggunakan fungsi semacam inilah Solow dan Swan bisa menghindari masalah “ketidakstabilan” dan mengambil kesimpulan-kesimpulan baru mengenai distribusi pendapatan dalam proses pertumbuhan (seperti halnya kaum Klasik). Dengan digunakannya fungsi produksi Neo-klasik tersebut, ada satu konsekuensi lain yang penting. Konsekuensi ini adalah bahwa seluruh

faktor yang tersedia, baik berupa K maupun berupa L akan selalu terpakai atau tergunakan secara penuh dalam proses produksi. Ini disebabkan karena dengan fungsi produksi Neo-Klasik tersebut, berapapun K dan L yang tersedia akan bisa dikombinasikan untuk proses produksi, sehingga tidak ada lagi kemungkinan “kelebihan” dan “kekurangan” faktor produksi seperti dalam model misalnya,

Ada dua masalah pokok yang saling berkaitan yang perlu dipelajari mengenai proses pertumbuhan Neo-Klasik ini. Masalah yang pertama menyangkut pertanyaan : apakah proses tersebut akan membawa perekonomian pada suatu pola pertumbuhan tertentu dan bisa diramalkan, apakah proses tersebut berkelanjutan dan sama sekali tidak bisa diduga kemana akan membawa perekonomian kita ? Dengan kata lain perkataan, apakah proses pertumbuhan tersebut akan membawa perekonomian pada posisi keseimbangan jangka panjang (long run equilibrium) atau tidak ?

Masalah yang kedua menyangkut pertanyaan : Apabila memang ternyata proses semacam itu akhirnya membawa perekonomian pada posisi keseimbangan jangka panjangnya, apakah ciri-ciri utama posisi ini ) ? Khususnya kita bisa menanyakan mengenai apa yang terjadi dengan output, capital, tenaga kerja, tingkat upah, tingkat keuntungan, dsb pada posisi long run equilibrium ini?

Jawaban bagi kedua masalah tersebut bisa menjadi landasan bagi ekonom dalam meramalkan apa yang akan terjadi dalam jangka

panjang terhadap suatu perekonomian, apabila asumsi-asumsi dasar Neo-Klasik tersebut terpenuhi. Perekonomian Neo-Klasik akan menuju ke suatu posisi keseimbangan jangka panjang. Kita memerlukan sedikit manipulasi aljabar untuk menjawab pertanyaan ini.

Anggap bahwa fungsi produksi  $Q = F ( K, L )$  mempunyai ciri constant return to scale artinya apabila K dan L masing-masing dinaikan dengan x%, maka Q juga akan naik dengan x%. Apabila constant return to scale berlaku, maka kita bisa menyatakan fungsi produksi tersebut dalam bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya  $F ( k, l )$  bisa kita nyatakan sebagai suatu fungsi lain  $F ( k )$  yang hanya mempunyai satu variable ( K saja ) karena angka 1 adalah suatu constant (bukan variable), sehingga fungsi produksi kita menjadi :

$$q = f ( k )$$

Persamaan ini mengatakan bahwa output per tenaga kerja adalah fungsi dari kapita per tenaga kerja, atau output per kapita adalah fungsi capital per kapita. Selanjutnya, penduduk (atau tenaga kerja) dianggap tumbuh dengan p setahun dan masyarakat mempunyai kecenderungan menabung yang ditunjukkan oleh propensity to save s. Semua yang ditabung diinvestasikan dan menambah stock capital dengan  $\Delta K = sQ$ . setelah mengalami manipulasi aljabar persamaan menjadi:

$$\dot{K} = K \cdot L$$

Persamaan diatas mengatakan bahwa laju pertumbuhan capital per kapita sama dengan laju pertumbuhan stok capital (total) minus laju pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja.

Lalu mana yang disebut keseimbangan jangka panjang ? Solow mengatakan bahwa posisi long run equilibrium akan tercapai apabila capital per kapita,  $k$ , mencapai suatu tingkat yang stabil, artinya tidak lagi berubah nilainya. Apabila  $K$  constant, maka long run equilibrium akan tercapai. Posisi long run equilibrium ini juga disebut posisi Steady state. Syarat ini mempunyai konsekuensi bahwa  $\dot{k} = 0$ .

Ciri yang pertama langsung dapat disimpulkan dari uraian di atas, yaitu bahwa pada posisi tersebut capital yang dipergunakan dalam proses produksi per pekerja adalah constant ( $k^*$ ) dan output per pekerja atau output perkapita adalah juga constant ( $q^*$ ). Dengan demikian pula capital output ratio adalah juga constant ( $v^*$ ). Karena  $v^* = k^* / q^*$

Ciri yang kedua adalah mengenai laju pertumbuhan output, capital dan tenaga kerja. Pada posisi long run equilibrium laju pertumbuhan output bisa disimpulkan dari ciri bahwa output perkapita adalah constant dan penduduk tumbuh dengan  $p$ . jadi singkatnya pada posisi ini  $Q, K, L$  tumbuh dengan laju yang sama. Dalam model Neo-Klasik, pertumbuhan  $Q$  dan  $K$  menyesuaikan diri dengan pertumbuhan penduduk. Dan pertumbuhan penduduklah yang menentukan PDRB; semakin cepat pertumbuhan penduduk tumbuh, semakin cepat pula pertumbuhan ekonomi. Ini adalah suatu kesimpulan yang bertolak

belakang dengan kesimpulan model Klasik maupun model Keynesian (Harrod-Domar).

Ciri yang ketiga adalah mengenai Stabilitas dari posisi keseimbangan tersebut. Posisi keseimbangan model Solow-Swan bersifat “stabil”, dalam arti bahwa apabila kebetulan perekonomian tersebut tidak pada posisi keseimbangan, maka akan ada kekuatan-kekuatan yang cenderung membawa kembali perekonomian tersebut pada posisi keseimbangan jangka panjangnya.

Ciri yang keempat menyangkut tingkat konsumsi dan tingkat tabungan (investasi)

Ciri yang kelima berkaitan dengan imbalan yang diterima oleh masing-masing faktor produksi ( K dan L ), lalu aspek distribusi pendapatan. Karena hanya ada macam faktor produksi, maka GDP ( = Q ) akan terbagi habis antara para pemilik capital dan para pemilik faktor produksi tenaga kerja (buruh),

$$Q = rK + wL$$

Dimana r adalah tingkat keuntungan yang diterima per unit kapital, dan w adalah tingkat yang diteriama oleh setiap orang buruh. Kita bisa simpulkan bahwa pada posisi keseimbangan jangka panjang baik r maupun w harus konstan yaitu setiap unit kapital menerima imbalan berupa keuntungan tertentu ( $r^*$ ) dan setiap pekerja menerima upah tertentu ( $w^*$ ), dan kedua imbalan ini tidak berubah dalam proses pertumbuhan selanjutnya.



Bagaimanakah dengan “bagian” (share) antara para pemilik capital dengan para “pemilik tenaga kerja” (buruh) di dalam GDP Negara tersebut?. Apabila pada posisi keseimbangan  $Q, L, K$  tumbuh dengan laju yang sama, dan  $r$  dan  $w$  adalah konstan, maka jelas bahwa para pemilik kapital dan kelompok buruh masing-masing akan menerima “bagian” dari GDP dalam presentase yang tetap, yaitu  $rK/Q$  akan tetap dan  $wL/Q$  juga akan tetap dalam proses pertumbuhan perekonomian selanjutnya.

Menurut teori ekonomi mikro, imbalan yang diterima oleh suatu factor produksi (pada posisi equilibrium) akan sama dengan marginal productnya. Jadi imbalan bagi faktor produksi kapital (pada posisi equilibrium) akan sama dengan MPK.

Ciri yang keenam, berkaitan dengan pertumbuhan produktivitas dapat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang diukur dalam satuan efisiensinya. Misal, apabila jumlah tenaga kerja sebelum adanya kemajuan teknologi adalah 100, dan kemudian ada kemajuan teknologi yang meningkatkan produktivitas pertenaga kerja dengan 50%nya, maka jumlah tenaga kerja efektif setelah kemajuan teknologi adalah 150 (meskipun jumlah manusianya tetap 100, tetapi kemampuan produksinya meningkat menjadi 150).

Jadi  $N$  (Laju pertumbuhan tenaga kerja efektif) tumbuh karena dua sebab, yaitu:

- 1) Pertumbuhan jumlah manusia atau pertumbuhan penduduk (misalnya,  $p$  per tahun) dan
- 2) Pertumbuhan produktivitas per manusia atau kemajuan teknologi (misalnya,  $t$  per tahun)

Jadi adanya kemajuan teknologi tidak banyak merubah syarat keseimbangan jangka panjang kecuali adanya koefisien  $t$  (laju kemajuan teknologi atau laju kenaikan produktivitas per tenaga kerja) Bahwa  $Q$ ,  $K$ ,  $N$  tumbuh dengan laju yang sama dan  $r$ ,  $w$  adalah konstan. Sehingga share dari faktor produksi kapital dalam GDP (yaitu  $rK/Q$ ) adalah konstan, dan demikian pula share dari faktor produksi tenaga kerja dalam GDP (yaitu  $wN/Q$ ) adalah juga konstan. Model Solow dapat juga dituliskan secara matematis sbb (ibid: 204):

$$\Delta k = sf(k) - (n + \delta + g)k$$

Dimana:  $y = f(k) = F(K/L)$

$n$  = tingkat pertumbuhan penduduk

$\delta$  = depresiasi

$k$  = modal per pekerja =  $K/L$

$y$  = output per pekerja =  $Y/L$

$s$  = tingkat tabungan

$g$  = tingkat perkembangan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja (laboraugmenting technological progress)

Pada model Solow tanpa perkembangan teknologi, perubahan modal per pekerja ditentukan oleh tiga variabel berikut:

- 1) Investasi (tabungan) per pekerja.
- 2) Pertumbuhan penduduk: pertumbuhan penduduk akan menurunkan tingkat modal per pekerja.
- 3) Depresiasi: persediaan modal akan menurun karena penggunaan modal.

Dalam kondisi steady-state,  $\Delta k$  harus sama dengan nol (ibid: 195),

sehingga:

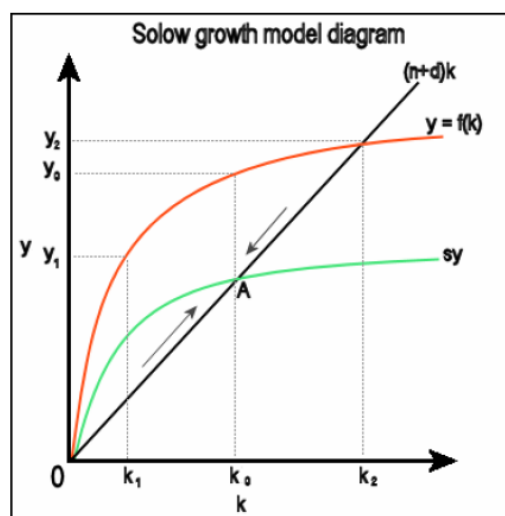
$$sf(k^*) = (n + \delta)k^*$$

dengan  $k^*$  adalah  $k$  pada kondisi steady-state dan  $y^* = f(k^*)$ .

Konsumsi pada kondisi steady-state menjadi (ibid: 196):

$$c^* = f(k^*) - (n + \delta)k^*$$

Secara grafis, model pertumbuhan Solow (tanpa perkembangan teknologi) dapat digambarkan seperti pada Grafik 1 berikut.



Gambar 2.1 Model Diagram Pertumbuhan Solow

Solow-Swan Economic memaparkan model suatu teori yang disusun dengan focus pada peranan perubahan teknologi dalam proses pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

### 3. Pengeluaran Pemerintah

#### a. Teori Dasar Pengeluaran Pemerintah

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan atas dua bagian yaitu teori makro dan mikro. Dalam teori ekonomi makro, ada dua pandangan yang berbeda berkenaan dengan pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional (Hidayat : 2010). Kedua pandangan yang berbeda mengenai pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi (pendapatan nasional) dalam kajian teori ekonomi makro dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Teori Wagner dan Pengikutnya

Dari persamaan empiris yang dilakukan oleh Adolph Wagner terhadap Negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke 19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat (*law of ever increasing state activity*). Wagner mengukur pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional dan hukum wagner dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$G_{pCt} > G_{pCt-1} > G_{pCt-2} \longrightarrow G_{pCt-n}$$

$$Y_{pCt} > Y_{pCt-1} > Y_{pCt-2} > Y_{pCt-n}$$

dimana :

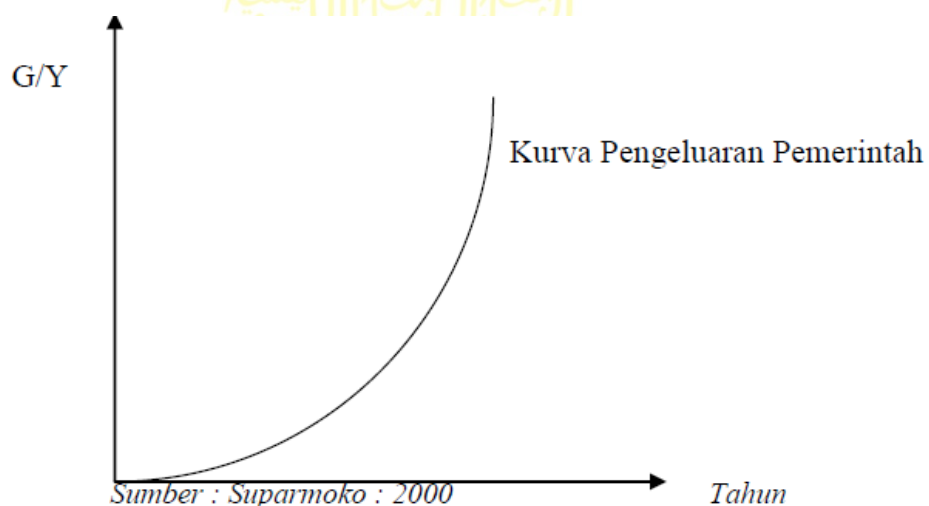
GpC : Pengeluaran pemerintah Per kapita

YpC : Pendapatan nasional Per kapita

t : Indeks Waktu

Disamping itu menurut wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu : (1) Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, (2) Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, (3) Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, (4) Perkembangan demokrasi dan (5) ketidak efisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah (Suparmoko : 2000).

Secara grafik, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional (GpC/Yp atau G/Y) ditunjukkan oleh sebuah kurva yang eksponensial sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.2 : Rasio Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Nasional Berdasarkan Hukum Wagner

Menurut Wagner pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industri-industri, industri masyarakat dan sebagainya akan semakin rumit dan kompleks sehingga potensi terjadinya kegagalan pasar eksternalitas negatif menjadi semakin besar. Sejalan dengan itu sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2 di atas, secara relatif peranan pemerintah akan semakin meningkat (Mangkoesobroto :1994).

Terdapat kelemahan dari hukum Wagner tersebut yakni tidak didasarkan pada teori mengenai pemilihan barang-barang publik.

Hal ini disebabkan karena

Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori organis mengenai pemerintah (Organic Theory Of The State). Yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat yang lain.

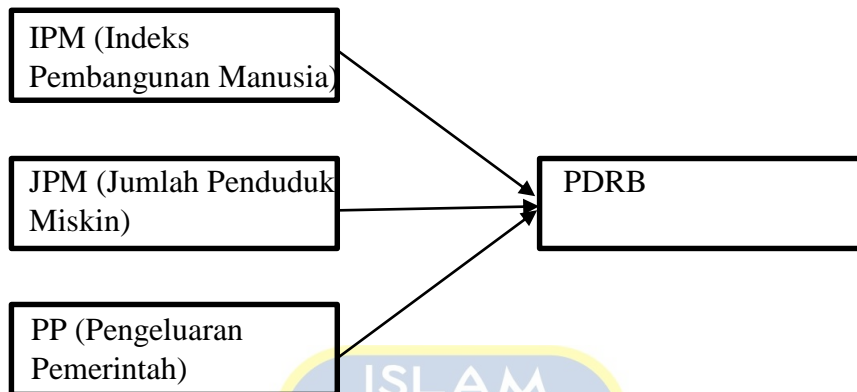
## 2) Teori Keynes

Identitas keseimbangan pendapatan nasional  $Y = C + I + G + X - M$  merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam mengatur pengeluarannya. Disamping itu pemerintah perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melamahkan kegiatan pihak swasta.

Banyak para ahli ekonomi publik telah lama menaruh perhatiannya pada penyelidikan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi semenjak mereka menyadari bahwa pengeluaran pemerintah memegang peranan yang sangat penting menurut Sukrino dalam Suparmoko (2000) pengeluaran pemerintah dapat dipandang sebagai perbelanjaan otonomi karena pendapatan nasional bukanlah merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menentukan anggaran belanja. Pada dasarnya ada tiga faktor penting yang akan menentukan pengeluaran pemerintah pada suatu tahun tertentu, yaitu (1) pajak yang diharapkan akan diterima (2) pertimbangan-perimbangan politik, dan (3) persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi. Sedangkan Wijaya dalam Suparmoko (2000) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah maupun efek penggandaan (multiplier effect) dan merangsang kenaikan pendapatan nasional yang lebih besar daripada pembayaran dalam jumlah yang sama pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan serta produksi secara berganda sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh (full employment).

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dibangun atas interaksi variabelvariabel penelitian, sebagai berikut :



Gambar 2.3 : Kerangka Pemikiran

Dari gambar kerangka pemikiran tersebut diatas, terlihat masing-masing variabel variabel : Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama mempengaruhi variable laju pertumbuhan PDRB.

### D. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis sementara menurut penulis adalah sebagai berikut :

1. Di duga IPM berpengaruh positif terhadap PDRB,
2. Di duga jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap PDRB,
3. Di duga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB,



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Cara Pengumpulan

Data Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder yang digunakan adalah data panel yang menggunakan gabungan dari deret waktu (*time series*) dari tahun 2011-2016 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 26 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota dan berhasil menghasilkan 156 observasi. Provinsi Jawa Barat sendiri sebetulnya memiliki 18 kabupaten, akan tetapi untuk kabupaten Pangandaran dihilangkan dalam observasi ini dikarenakan Pangandaran baru berdiri pada tahun 2012, sedangkan penelitian ini mengambil periode waktu 2011 hingga 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel independen (Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Daerah) berpengaruh terhadap variabel dependen (PDRB). Guna melakukan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi determinan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2016 dan data yang diperoleh merupakan data literature yang berkaitan berupa, dokumen, artikel, catatan, arsip dan bacaan ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian

## B. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel dependen adalah Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Upah Minimum digunakan sebagai variabel independen.

### 1. Variabel Dependen (Y)

#### PDRB

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (satuan milyar rupiah).

### 2. Variabel Independen (X)

#### a. Indeks Pembangunan Manusia (X1)

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah indeks komposit dari gabungan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lamanya sekolah dan pengeluaran per kapita di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (satuan persen)

#### b. Jumlah Penduduk Miskin (X2)

Tingkat Kemiskinan adalah jumlah penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu

memenuhi kebutuhan hidup di masing-masing Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (dalam satuan ribu jiwa).

c. Pengeluaran Pemerintah (X3)

Pengeluaran Pemerintah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dimana Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah (satuan milyar rupiah).

### C. Metode Analisis

Metode analisis data didalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif. Untuk mengolah data dalam penelitian ini menggunakan analisis dan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Metode yang digunakan adalah Metode Regresi Data Panel.

$$PDRB = \beta_0 + \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + \beta_3 X3 + \epsilon_{it}$$

Dimana:

PDRB = PDRB di Provinsi Jawa Barat tahun 2011- 2016 (rupiah)

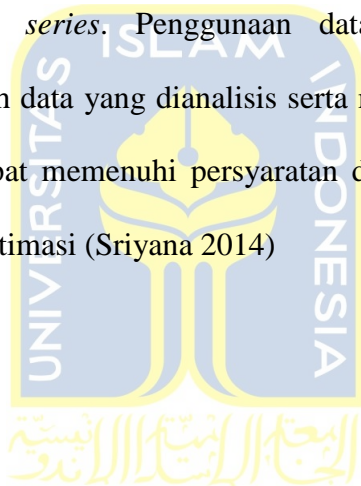
IPM (X1) = indeks Pembangunan Manusia dengan metode baru yang telah diterbitkan oleh badan pusat statistic Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (%)

TK (X2) = Jumlah Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2016 (ribu jiwa)

PP (X3) = Pengeluaran Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (rupiah)

#### D. Estimasi Model Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel didefinisikan sebagai penggabungan data *cross section* dan *time series*. Penggunaan data panel dapat memberikan ketersediaan jumlah data yang dianalisis serta memberikan jumlah data yang banyak hingga dapat memenuhi persyaratan dan sifat-sifat statistik dengan beberapa pilihan estimasi (Sriyana 2014)



##### 1. Metode Estimasi Data Panel

###### a. *Common effect model*

Metode pendekatan common effect menganggap bahwa intersep dan slope tetap berhubungan baik antar individu maupun antar waktu. Dapat diasumsikan adanya perbedaan intersep dan slope akan dijelaskan oleh variabel pengganggu (error atau residual). (Sriyati, 2014) Model common effect dapat dikatakan sebagai model paling sederhana karena hanya menggabungkan antara data time series dan

data cross section kedalam data panel (pool sata). Dari hasil data tersebut kemudian dapat diregresi dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS).

*b. Fixed effect model*

Model ini dapat diasumsikan bahwa obyek observasi maupun koefisien regresi (slope) tetap besar dari waktu ke waktu. Dalam estimasi fixed effect dilakukan dengan menggunakan dummy sesuai dengan definisi dan kriteria masing-masing asumsi. Least Square Dummy variables (LSDV) yang sering disebut dalam Model estimasi ini. Dengan persamaan regresi data panel:

$$\text{PDRB} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon_{it}$$

Dimana:

PDRB = PDRB di Provinsi Jawa Barat tahun 2011- 2016 (rupiah)

IPM (X1) = indeks Pembangunan Manusia dengan metode baru yang telah diterbitkan oleh badan pusat statistic Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (%)

TK (X2) = Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2016 (ribu jiwa)

PP (X3) = Pengeluaran Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (rupiah)

Pendekatan *fixed effect* ini memiliki kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian model terhadap keadaan yang sesungguhnya. Sehingga diperlukan model yang dapat menunjukkan perbedaan dengan intersep yang mengasumsikan adanya perbedaan antar objek maupun antar waktu (Sriyana 2014).

c. *Random effect model*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan intersep dan konstanta dapat disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antar unit dan periode waktu yang terjadi secara random. Model estimasi ini disebut dengan *Error Component Model* (ECM). Dijelaskan oleh (Sriyana, 2014) 2. Pemilihan Model Tujuan memilih model estimasi adalah untuk memilih model yang tepat, terdapat beberapa pengujian yang dilakukan, yaitu: 1. Uji Chow Uji chow adalah pengujian untuk menentukan model Common effect atau fixed effect yang tepat untuk digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah : -  $H_0$  : Dapat digunakan untuk memilih model *Common effect* atau pooled OLS jika nilai probabilitas F statistiknya tidak signifikan pada  $\alpha$  0,05%.

$H_1$  : Dapat digunakan untuk memilih model *fixed effect*, jika nilai probabilitas F statistiknya signifikan pada  $\alpha$  0,05%. Hipotesis yang digunakan harus memiliki intersep dengan nilai yang sama. Jika nilai probabilitas F statistic > dari F tabel maka akan menyebabkan  $H_0$

ditolak, berarti model yang tepat untuk digunakan adalah model fixed effect, dan begitu juga sebaliknya (Sriyana, 2014).

## 2. Uji Hausman

Uji Hausman dapat digunakan sebagai pengujian statistik dalam memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang sangat tepat digunakan. Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

- $H_0$  : Memilih model *Random Effect*, jika nilai chi-square tidak signifikan pada  $\alpha 0,05\%$
- $H_1$  : Memilih model *Fixed effect*, jika nilai chi-square signifikan terhadap  $\alpha 0,05\%$

## 3. Pengujian Hipotesis

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji koefisien Determinan ( $R^2$ ), Uji Koefisien Regresi bersama-sama (Uji F) dan Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t).

- a. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ) Dijelaskan oleh Sriyana (2014) bahwa koefisien detrminan dilakukan untuk mengetahui seberapa baik didalam analisis, yang ditunjukkan oleh nilai  $R^2$  dalam bentuk presentase. Besarnya  $R^2$  berasal dari proporsi variabel dependen yang dijelaskan menggunakan model dan sisanya tidak dijelaskan menggunakan model. Semakin tinggi nilai  $R^2$  maka hubungan variabel independen dengan variabel dependen semakin kuat.

- b. Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F) Pengujian variabel dependen terhadap variabel independen secara sendiri dapat diuji serentak dengan Uji F. untuk menguji koefisien regresi secara bersamaan perlu dilakukan dengan membuat hipotesis :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$$

Jika F hitung > dari F tabel (kritis) maka akan menolak H<sub>0</sub> namun jika F hitung < dari F tabel (kritis) maka akan menerima H<sub>0</sub> (Sriyana 2014).

- c. Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) Uji t dapat digunakan untuk menyusun hipotesis statistik, untuk menentukan derajat kesalahan ( $\alpha$ ), menentukan t kritis dan keputusan hipotesis. Nilai t tabel didapatkan dengan  $\alpha = 0,05\%$  dan df. Jika nilai thitung > ttabel maka H<sub>0</sub> diterima atau menolak H<sub>1</sub>, jika thitung < ttabel maka H<sub>0</sub> ditolak dan menerima H<sub>1</sub> (Sriyana 2014).



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Data**

###### **a. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan pada penelitian ini adalah IPM yang dikeluarkan secara resmi oleh BPS untuk masing-masing Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2016. IPM sesungguhnya mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

## **b. Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2016**

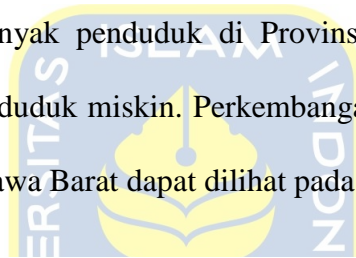
Kata miskin mengindentikan kita mengenai kondisi seseorang yang tidak berharta, serba kekurangan, sedangkan kemiskinan adalah hal miskin atau keadaan kemiskinan, artinya situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan kehidupan yang minimum.

Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (World Bank, 2006). Selain itu kemiskinan merupakan masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, antara lain tingkat pendapatan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Di Indonesia, pengukuran seseorang untuk di katakan miskin ialah menurut standar penentu yang diberikan oleh BPS. Kriteria yang di gunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur garis kemiskinan tersebut adalah pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tersebut. Penentuannya memiliki batas nominal dan juga pengukuran atas kalori yang dikonsumsi, dimana penduduk dikatakan miskin apabila kemampuan

untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 1900 sampai 2100 kalori per orang, atau setara dengan Rp 150.000,- per orang per bulan. Sedangkan garis kemiskinan non makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Jawa Barat termasuk salah satu provinsi yang terdapat didalam kawasan Indonesia juga mengenakan standar pengukuran terhadap orang miskin seperti yang telah diberikan oleh BPS. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius. Banyak penduduk di Provinsi Jawa Barat yang tergolong dalam penduduk miskin. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 4.2.



**Tabel 4.2**  
**Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat, 2011–2016**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (Juta Jiwa)	Persentase
2011	226 097	4,650	10,57
2012	242 104	4,421	9,89
2013	276 825	4,382	9,61
2014	291 474	4,238	9,18
2015	318 602	4,485	9,57
2016	332 119	4,168	8,77

### c. Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2016

Pembahasan mengenai perkembangan alokasi pengeluaran pemerintah dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pertumbuhan serta proporsi dapat memberikan suatu petunjuk secara

umum perihal bagaimana kebijakan pengeluaran pemerintah yang telah dijalankan selama kurun waktu pengamatan. Hasil perhitungan mengenai proporsi ditunjukkan dalam Tabel 4.3

**Tabel 4.3**  
**Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Barat**

Rincian		2012	2013	2014	2015	2016 *)
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	13.648.410.111	14.724.113.008	16.958.816.394	19.626.961.424	21.755.509.507
1	Belanja Pegawai	1.535.932.802	1.569.541.693	1.750.356.996	1.569.541.693	2.104.513.145
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	2.940.521	6.805.400	10.000.000	6.805.400	15.000.000
4	Belanja Hibah	5.673.020.648	6.179.782.845	7.154.144.995	6.179.782.845	7.154.144.995
5	Belanja Bantuan Sosial	13.600.215	2.871.320	12.000.000	2.871.320	12.000.000
6	Belanja Bagi Hasil	3.994.277.232	5.461.539.028	6.134.790.633	5.461.539.028	6.134.790.633
7	Belanja Bantuan Keuangan	2.815.801.802	3.504.341.590	3.738.146.028	4.448.668.800	3.523.311.002
8	Pengeluaran Tidak Terduga	6.856.333	-	130.079	117.000.000	50.000.000
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.274.067.487	3.672.632.315	3.839.172.021	5.126.796.909	6.847.772.774
1	Belanja Pegawai	426.605.110	304.590.204	237.420.694	304.590.204	271.904.077
2	Belanja Barang dan Jasa	1.733.979.983	1.973.247.376	2.174.779.252	2.656.963.530	3.029.926.405
3	Belanja Modal	1.272.779.829	1.359.802.565	2.232.412.685	1.359.802.565	3.545.942.291
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	2.958.837.956	3.775.496.831	5.007.648.558	560.727.063	2.049.472.840
	<b>JUMLAH</b>	25.805.636.973	25.314.485.396	22.172.242.154	25.805.636.973	25.314.485.396

Perhitungan mengenai perkembangan Proporsi jenis-jenis pengeluaran menunjukkan adanya kecenderungan yang tetap dari tahun pengamatan 2011 sampai dengan 2016. Dengan demikian nilai rata-rata proporsi untuk tiap-tiap jenis pengeluaran cukup berarti untuk dijadikan dasar pembahasan.

## 2. Hasil Pengujian

### a. Uji Chow

Pertama-tama data panel diesmitasi menggunakan efek spesifikasi fixed. Uji yang dilakukan yaitu uji Chow. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya model menggunakan fixed effect atau common effect.

$H_0$  : Common Effect

$H_a$  : Fixed Effect

Apabila hasil probabilitas chi-square kurang dari 5%, maka  $H_0$  ditolak. Sehingga, Model menggunakan fixed effect. Hasil dari estimasi menggunakan efek spesifikasi fixed adalah sebagai berikut :

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: FIXED  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	118.547809	(25,127)	0.0000
Cross-section Chi-square	497.946423	25	0.0000

Berdasarkan hasil di atas, diketahui probabilitas Chi-square sebesar 0,0000 sehingga menyebabkan  $H_0$  ditolak. Maka model fixed adalah model yang sebaiknya digunakan.

### b. Correlated Random Effect-Hausmann Test

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik digunakan dari fixed effect.

H0 : Random Effect

Ha : Fixed Effect

Apabila hasil probabilitas chi-square lebih dari 5%, maka sebaiknya model menggunakan random effect. Hasil dari estimasi menggunakan efek spesifikasi random adalah sebagai berikut :

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RE

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	16.131141	3	0.0011	
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
			270747.75188	
X1	2897.263177	-1722.702723	2	0.0240
X2	0.000025	0.000024	0.000000	0.1315
X3	0.000003	0.000003	0.000000	0.1157

Hasil probabilitas chi-square sebesar 0,0011. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model sebaiknya menggunakan fixed effect.

Berdasarkan table di atas alat analisis menggunakan regresi data panel, jenis data adalah sekunder diambil dari BPS (Badan Pusat Statistik). Dari 3 model yaitu: common effect, fixed effect, dan random effect hasil terbaiknya memakai fixed effect, karena cross section uji Chow sebesar 0.0000 lebih kecil dari alfa 0.05 dan cross section uji Hausman sebesar 0.0011 lebih kecil dari alfa 0.05. Dengan dua nilai probabilitas signifikan pada variabel X1 (IPM atau

Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 0.0240 persen lebih kecil dari alfa 0.000. Dan memiliki nilai R-square sebesar 0.981747 atau 98,17 persen dan sisanya 1,83 persen dijelaskan oleh variabel lainnya.

### c. Fixed Effect

Pada *Fixed Effect Model*, perbedaan antar individu atau waktu terakomodasi melalui *error*. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa *error* memiliki kemungkinan berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross section* (Suliyanto, 2011).

Berikut adalah hasil data *Fixed Effect Model* yang telah diolah menggunakan software *EViews*

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 11/21/18 Time: 09:55  
 Sample: 2011 2016  
 Periods included: 6  
 Cross-sections included: 26  
 Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	4467.686	977.1950	4.571949	0.0000
X2	115.0979	65.92925	1.745779	0.0833
X3	8.26E-06	1.17E-06	7.040443	0.0000
C	-293123.3	71343.42	-4.108624	0.0001

#### Effects Specification

##### Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.981747	Mean dependent var	50255.18
Adjusted R-squared	0.977723	S.D. dependent var	54198.93
S.E. of regression	8089.409	Akaike info criterion	21.00062
Sum squared resid	8.31E+09	Schwarz criterion	21.56759
Log likelihood	-1609.049	Hannan-Quinn criter.	21.23090
F-statistic	243.9615	Durbin-Watson stat	1.050949
Prob(F-statistic)	0.000000		

$$\text{PDRB} = -293123.3 + 4467.686 X_1 + 115.0979 X_2 + 8.26E-06 X_3 + \epsilon_{it}$$

Dimana:

PDRB = PDRB di Provinsi Jawa Barat tahun 2011- 2016 (rupiah)

IPM (X1) = indeks Pembangunan Manusia dengan metode baru yang telah diterbitkan oleh badan pusat statistic Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (%)

TK (X2) = Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2016 (ribu jiwa)

PP (X3) = Pengeluaran Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat (rupiah)

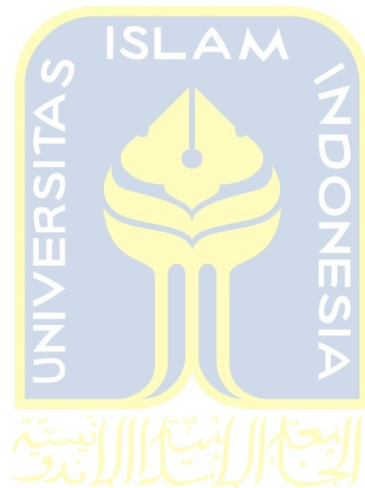
**d. Koefisien Determinan R**

Hasil uji koefisien determinan (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat (dependent) secara statistik. Berdasarkan tabel di atas, nilai R-Square sebesar 0.981747, yang berarti perubahan kemiskinan di Jawa Barat sebesar 98,17% yang dipengaruhi IPM dan Tingkat kemiskinan. Sedangkan 1,83% dipengaruhi oleh variabel diluar variabel penelitian ini.

**e. Uji Signifikan Secara Keseluruhan (Uji F)**



Uji F ini digunakan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel bebas (*independent*) yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (*dependent*). Dilihat dari tabel di atas yang menunjukkan besarnya F-statistik sebesar 118.547809 serta nilai probabilitas F sebesar 0,000000. Maka nilai  $\text{Prob} > F$  lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ , maka dapat dikatakan variabel bebas (*independent*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (*dependent*).



## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam hasil penelitian ini indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap PDRB di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat, hal ini sesuai dengan hasil hipotesis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hasil perhitungan dapat diketahui bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 dan koefisien sebesar 4467.686, artinya setiap kenaikan 1 porsi IPM maka menyebabkan PDRB naik sebesar 4467.686 persen. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh model yang digunakan dalam menguji hipotesis menggunakan model *fixed effect*. Peningkatan indeks pembangunan manusia seperti meningkatkan keahlian serta pendidikan yang tinggi akan membuka peluang dalam mendapatkan pekerjaan atau upah yang layak sehingga akan menyebabkan jumlah penduduk miskin menurun. Peningkatan sumber daya manusia akan memberikan pengaruh terhadap nilai pengurangan kemiskinan yang terjadi. Hal tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhdiyaty (2017) yang menyimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Pratama (2014) yang menyimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia serta penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) yang menyimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

## **B. Jumlah Penduduk Miskin**

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap PDRB. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang sudah jelas sebelumnya. Dalam perhitungan menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin memiliki probabilitas sebesar 0,0833 signifikan pada tingkat alpha 10% (0.1) dengan koefisien bernilai 3.56, yang artinya jumlah penduduk miskin secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat. Apabila jumlah penduduk miskin meningkat, maka PDRB pun akan berkurang. PDRB yang lebih tinggi akan didukung dengan melakukan pengurangan kemiskinan dengan lebih cepat dan tepat

## **C. Pengeluaran Pemerintah**

Dalam hasil penelitian ini indeks pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PDRB di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat, hal ini sesuai dengan hasil hipotesis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam perhitungan menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah memiliki nilai probabilitas 0,0000 signifikan pada tingkat alpha 5% (0.05) dengan koefisien bernilai 8.26, yang artinya setiap kenaikan pengeluaran pemerintah 1 milyar rupiah memiliki pengaruh 8.26 milyar rupiah terhadap PDRB. Kemudian untuk variabel pengeluaran pemerintah menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PDRB, yang berarti bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah akan berpengaruh terhadap PDRB.

Sehingga walaupun pengeluaran pemerintah meningkat maka PDRB juga akan meningkat.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisis pengaruh dari variabel yang meliputi: indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2016 dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif PDRB di Jawa Barat tahun 2011-2016, maka apabila Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dapat berpengaruh kepada peningkatan PDRB di Jawa Barat
2. Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap PDRB di Jawa Barat tahun 2011-2016, maka apabila Tingkat Kemiskinan mengalami penurunan dapat berpengaruh kepada peningkatan PDRB di Jawa Barat
3. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB di Jawa Barat tahun 2011-2016, maka Pengeluaran Pemerintah mengalami peningkatan dapat berpengaruh kepada peningkatan PDRB di Jawa Barat

#### **5.2 Saran**

1. Untuk meningkatkan PDRB Jawa Barat dapat dilakukan dengan meningkatkan IPM di masing-masing kabupaten dan kota.
2. Untuk meningkatkan PDRB Jawa Barat dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat kemiskinan di masing-masing kabupaten dan kota.

3. Untuk meningkatkan PDRB Jawa Barat dapat dilakukan dengan meningkatkan Pengeluaran Pemerintah di masing-masing kabupaten dan kota.



### Daftar Pustaka

- Bintang, Sanusi. 2002. Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Elvina, Yuni. H. 2011. Analisis faktor-faktor Yang Mempengaruhi ekonomi Kota Medan. Tesis Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Gherghina, Stefan Cristian, et al. 2013. An Empirical Research on the Relationship Between Corporate Social Responsibility Ratings and U.S. Listed Companies' Value. *Journal of Economics Studies and Research*, Vol. 2015.
- Herlambang, dkk. 2002. Teknologi Pengolahan Limbah Industri. Pusat Pengkajian dan Penerapan teknologi Lingkungan, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, Material, dan Lingkungan, BPPT : Jakarta Pusat
- Mangkoesebroto, Guritno. 1994, Kebijakan Publik Indonesia Substansi dan Urgensi, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Mankiw, N. Gregory. 2000. Teori Makroekonomi Edisi Keempat. Terjemahan: Imam Nurmawan. Jakarta : Erlangga.
- Prathama Rahardja and Mandala Manurung. 2002. Teori Ekonomi Makro. Edisi Keempat. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Rustiono, Deddy. 2008. Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah. Tesis. Magister Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan.
- Sabar, Wardihan. 2013. Determinan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang. *Jurnal Pembangunan dan Pertanian* Vol. 3, No. 1.
- Sriyana, J, 2014, Metode Regresi Data Panel, Yogyakarta, Ekonisia.
- Sukirno, Sadono. 2001. Makroekonomi Teori Pengantar. Rajawali Pers. Jakarta.
- Suparmoko, 2000. Keuangan Negara: Teori dan Praktek. BPFE-Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus (2001), Analisis terhadap Peranan Industri Kecil/Rumah Tangga di dalam Perekonomian Regional: Suatu Studi Perbandingan antar Kabupaten di Propinsi Jawa Barat.
- Tarigan, Robinson. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah (edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. 2000. "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga", edisi ke 7. Jakarta: Penerbit Erlangga

- Wahyudin, Didin., dan Yuliadi I. 2013. Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 14, No. 2, Oktober 2013
- Yuliarmi, Nyoman. 2008. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Propinsi Bali ; Bulletin Studi Ekonomi Vo.13 No.2 Tahun 2008, Universitas Udayana Denpasar.





